

KUMPULAN ANALISIS

SIKLUS PEMBAHASAN
NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2024

MITRA KOMISI X





BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



TINJAUAN KRITIS LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

2023

Analisis Siklus Induk

TINJAUAN KRITIS LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)
Oleh: Dahiri, Savitri Wulandari, Ollani Vabiola Bangun, Iranisa

I. PENDAHULUAN

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara global tercermin dari *Human Development Index* (HDI) *very high* (0,8-1), *high* (0,7-0,79), *medium* (0,55-0,7), dan *low* (kurang dari 0,55). Berdasarkan peringkat tersebut, Indonesia telah mencapai peringkat *high*. Namun, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Singapore, Brunei, Malaysia, dan Thailand yang telah mencapai peringkat *very high* (Gambar 1).

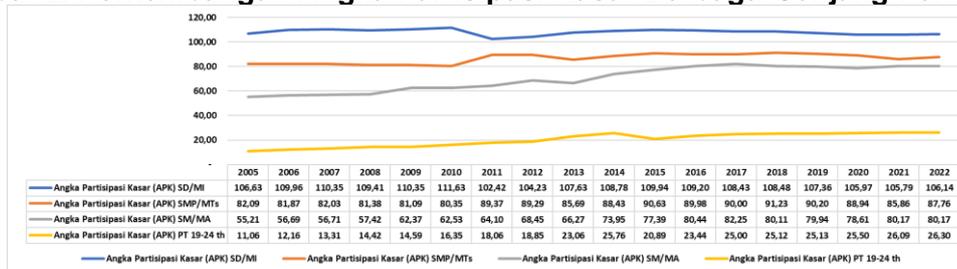
Gambar 1. Capaian HDI Kawasan Asia Timur dan Pasifik 2021

| Rank | Country | HDI Value | Change from 2020 | Rank | Country | HDI Value | Change from 2020 |
|------|------------------|-----------|------------------|------|----------------------------------|-----------|------------------|
| 12 | Singapore | 0.939 | ▲ 0.000 | 51 | Brunei Darussalam | 0.829 | ▼ -0.001 |
| 62 | Malaysia | 0.803 | ▼ -0.003 | 66 | Thailand | 0.800 | ▼ -0.002 |
| 79 | China | 0.768 | ▲ 0.004 | 80 | Palau | 0.767 | ▼ -0.006 |
| 91 | Tonga | 0.745 | ▲ 0.000 | 96 | Mongolia | 0.739 | ▼ -0.006 |
| 99 | Fiji | 0.730 | ▼ -0.007 | 111 | Samoa | 0.707 | ▼ -0.005 |
| 114 | Indonesia | 0.705 | ▼ -0.004 | 115 | Viet Nam | 0.703 | ▼ -0.007 |
| 116 | Philippines | 0.699 | ▼ -0.011 | 130 | Tuvalu | 0.641 | ▲ 0.002 |
| 131 | Marshall Islands | 0.639 | ▲ 0.000 | 134 | Micronesia (Federated States of) | 0.628 | ▼ -0.001 |
| 136 | Kiribati | 0.624 | ▲ 0.001 | 140 | Leo People's Democratic Republic | 0.607 | ▼ -0.001 |
| 140 | Timor-Leste | 0.607 | ▼ -0.007 | 140 | Vanuatu | 0.607 | ▼ -0.001 |
| 146 | Cambodia | 0.593 | ▼ -0.003 | 149 | Myanmar | 0.585 | ▼ -0.015 |
| 155 | Solomon Islands | 0.564 | ▼ -0.001 | 156 | Papua New Guinea | 0.558 | ▼ -0.002 |

Sumber: UNDP (2022).

Salah satu faktor rendahnya HDI ini yaitu akses pendidikan yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK), khususnya pendidikan tinggi (PT). APK PT 19-24 tahun dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan sebesar 37,63 persen. Namun, per tahun 2022, APK PT Indonesia baru mencapai 26,30 persen. Sedangkan APK pada jenjang lainnya sudah mencapai lebih dari 80,17 persen (Gambar 2).

Gambar 2. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Berbagai Jenjang Pendidikan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2022).

Rendahnya HDI Indonesia dibandingkan negara tetangga serta rendahnya capaian APK PT hingga saat ini menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan masih belum optimal.

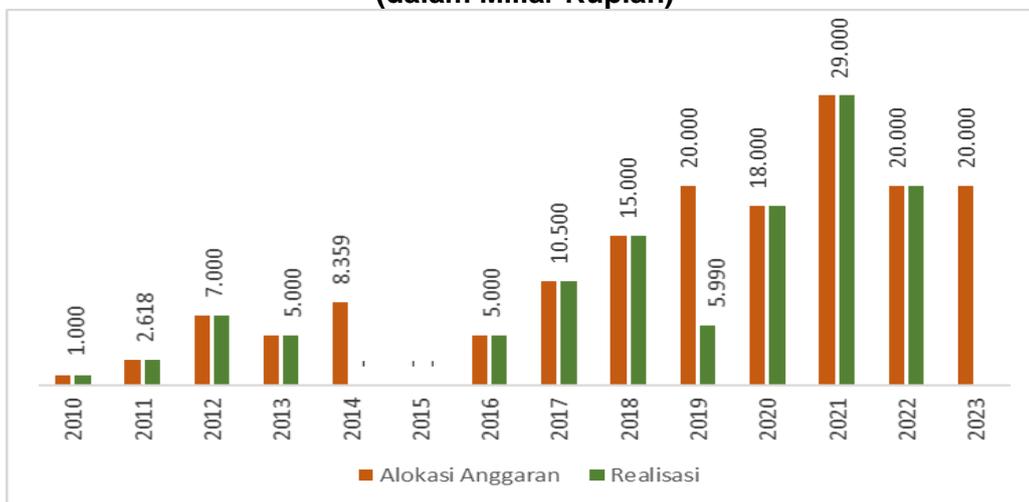
II. PEMBAHASAN

1. Pengelolaan dan Perkembangan Anggaran LPDP

Akumulasi investasi pemerintah pada BLU LPDP dari tahun 2010 hingga tahun 2022 sebesar Rp110.118 miliar. Pada tahun 2014 tidak ada realisasi pengeluaran untuk DPPN dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp8.359 miliar. Tahun 2019 realisasi pembiayaan untuk DPPN tidak sepenuhnya terealisasi sesuai dengan yang dianggarkan. Untuk tahun selain 2019, realisasi pembiayaan 100 persen dari yang sudah dianggarkan. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp20.000 miliar dengan rincian alokasi DAP (termasuk Dana Abadi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan) sebesar Rp10.000 miliar, DAPL sebesar Rp5.000

miliar, DAKB sebesar Rp2.000 miliar, dan DAPT sebesar Rp3.000 miliar. Berikut Gambar 4 menggambarkan alokasi dan realisasi investasi pemerintah kepada BLU LPDP dari tahun 2010 hingga tahun 2023.

Gambar 3. Alokasi dan Realisasi Investasi Pemerintah pada BLU LPDP (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, berbagai tahun (diolah) (2023).

Target penyaluran LPDP tahun 2023 sebesar Rp3.082 miliar dengan (1) Penyaluran beasiswa sebesar Rp2.232 miliar dengan target penerima beasiswa untuk program *native* LPDP diproyeksikan sebanyak 3.256 orang, sedangkan mahasiswa *on-going* (dalam pendanaan) berjumlah 7.047 orang yang terdiri dari program LPDP sebesar Rp1.527 miliar, Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebesar Rp533 miliar, dan Program Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp171 miliar; (2) Layanan riset sebesar Rp461 miliar dengan target untuk 75 riset baru dan 39 riset lanjutan; (3) Dana Abadi Penelitian sebesar Rp133 miliar; (4) Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp75 miliar; (5) Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp175 miliar. Belanja operasional LPDP untuk tahun 2023 sebesar Rp139 miliar. Sejak tahun 2010 hingga 29 Maret 2023, sudah 35.536 orang yang menerima beasiswa dengan 17.979 orang alumni dan telah mendanai 1.891 judul riset. Berikut Tabel 1 merinci penerima beasiswa dari tahun 2013 hingga tahun 2021.

Tabel 1. Penerima Beasiswa Menurut Program Tahun 2013-2021

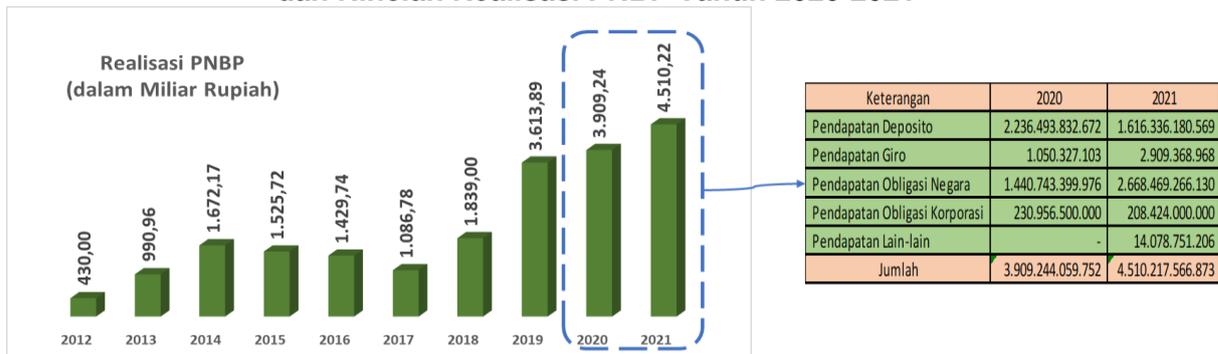
| Jenis Beasiswa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Beasiswa penuh | 1.034 | 2.665 | 4.386 | 6.520 | 1.910 | 1.706 | 4.500 | 278 | 4.249 | 27.248 |
| Afirmasi | 26 | 672 | 949 | 1.174 | 502 | 483 | 1.828 | - | 1.405 | 7.039 |
| BPRI | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 109 |
| Grup Targetted | - | - | - | 2.168 | 353 | 701 | 1.602 | 232 | 1.109 | 6.165 |
| Umum | 1.008 | 1.884 | 3.437 | 3.178 | 1.055 | 522 | 1.070 | 46 | 1.735 | 13.935 |
| Beasiswa Sebagian | 521 | 219 | 265 | 685 | 261 | 83 | 171 | 402 | 17 | 2.624 |
| Disertasi, Top Up, Co-Funding | 521 | 219 | 265 | 685 | 261 | 83 | 171 | 402 | 17 | 2.624 |
| Total | 3.110 | 5.768 | 9.302 | 14.410 | 4.342 | 3.578 | 9.342 | 1.360 | 8.532 | 59.744 |

Sumber: LPDP (2022).

Hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan selama tahun 2022 (sampai dengan 31 Juli 2022) sebesar Rp2.944,1 miliar yang terdiri dari hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan Rp2.452,7 miliar, Dana Abadi Penelitian Rp219,6 miliar, Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp190,9 miliar, dan Dana Abadi Kebudayaan Rp80,9 miliar. Secara akumulatif, total hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sejak 2010 sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp24.681,7 miliar. Per 31 Desember tahun 2021, realisasi

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pengelolaan dana abadi sebesar Rp4,51 triliun dari target Rp4,24 triliun dengan *annualized yield* 5,64 persen dari target *yield* tahun 2021 sebesar 5,5 persen. Terlihat pada Gambar 5, PNBP atas pengelolaan dana abadi secara signifikan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan yang signifikan yang mencapai 96,51 persen dari tahun 2018. Realisasi PNBP LPDP tahun 2021 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2020, namun untuk realisasi PNBP pendapatan deposito dan pendapatan obligasi korporasi lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Gambar 4. Pendapatan PNBP LPDP Tahun 2012-2021 (dalam Triliun Rupiah) dan Rincian Realisasi PNBP Tahun 2020-2021



Sumber: LPDP, 2013-2022 (diolah) (2023).

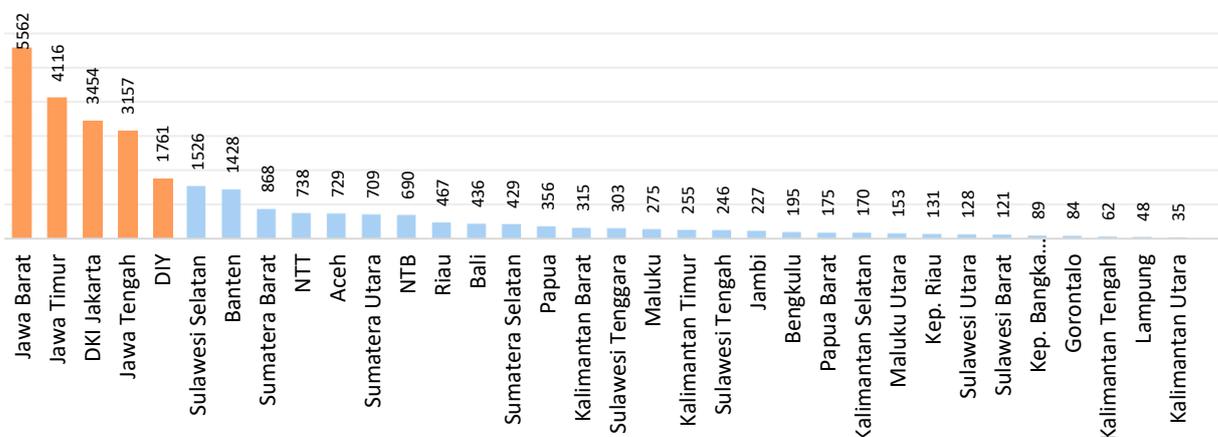
2. Critical Review Dana Abadi Pendidikan Oleh LPDP

Hingga tahun 2023, hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan telah disalurkan kepada kurang lebih 40.000 beasiswa magister dan doktoral. Selain itu, LPDP juga bekerjasama dengan Kemdikbudristek untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 17.521 orang dan beasiswa nongelar kepada 142.231 orang pada periode yang sama. LPDP juga berkolaborasi dengan Kemenag untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 4.284 orang dan beasiswa nongelar kepada 15.805 orang. Sementara untuk beasiswa riset, LPDP telah mendukung pendanaan bagi 2.426 riset (Nota Keuangan RAPBN 2024).

Beasiswa dan bantuan riset tersebut ditujukan untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang mampu bersaing secara global, meningkatkan jumlah dan kualitas riset di Indonesia, serta tersedianya dana untuk pendidikan antar generasi (Nota Keuangan RAPBN 2024). Untuk itu, Pemerintah perlu memerhatikan beberapa hal yang berpotensi mengganggu optimalisasi pencapaian tujuan-tujuan tersebut, antara lain:

Pertama, tingginya tingkat kesenjangan antar daerah penerima bantuan beasiswa. Hingga saat ini, penerima beasiswa LPDP masih terkonsentrasi di Indonesia Bagian Barat. Penerima beasiswa yang berasal dari Pulau Jawa bahkan mencapai lebih dari 60 persen dari 29.438 penerima beasiswa (Gambar 5). Masih sangat mendominasinya penerima beasiswa yang berasal dari pulau Jawa dapat disebabkan oleh adanya kesenjangan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) antarwilayah. Akses TIK di Indonesia masih mengalami kesenjangan di mana pengguna internet masih didominasi di Pulau Jawa (BPS, 2019). Sistem pelaksanaan seleksi beasiswa berbasis daring cenderung merugikan daerah dengan infrastruktur TIK yang terbatas. Maka dari itu, tidak heran bila mayoritas calon penerima berasal dari kota-kota besar.

Gambar 5. Jumlah Penerima Beasiswa Berdasarkan Provinsi Asal (orang) Akumulasi dari tahun 2013 s.d. 31 Desember 2021



Sumber: Laporan Tahunan LPDP (2021).

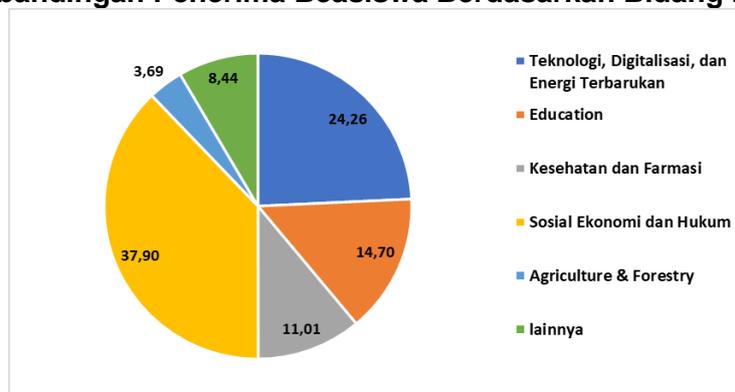
Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM tidak bisa diwujudkan dengan hanya bertumpu di satu wilayah saja, melainkan harus menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemanfaatan Dana Abadi Pendidikan tersalurkan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda-beda.

Selain kesenjangan antardaerah, kesenjangan yang signifikan dalam kemampuan mengakses pendidikan tinggi antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya menyebabkan **beasiswa LPDP belum sepenuhnya mampu membantu siswa-siswa yang paling membutuhkan**. Peningkatan kualitas SDM melalui pelayanan LPDP terutama bagi masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun LPDP telah menyediakan program beasiswa afirmasi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat prasejahtera untuk melanjutkan studi jenjang pendidikan master, namun kebanyakan anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang paling miskin bahkan putus sekolah sebelum mereka mencapai pendidikan tinggi¹, maka kecil kemungkinan anak dari rumah tangga termiskin dapat menjadi penerima manfaat beasiswa LPDP. Sementara anak yang berasal dari rumah tangga menengah-atas di Indonesia dengan tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi memiliki potensi yang lebih besar untuk menikmati pembiayaan pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN tersebut.

Kedua, pemberian beasiswa dan bantuan riset harus difokuskan pada penciptaan tenaga kerja dalam sektor-sektor strategis yang memiliki daya ungkit tinggi bagi pembangunan nasional. Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan yang terjadi secara global. Disrupsi teknologi, perubahan profil sosio-ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan terhadap energi alternatif untuk melawan perubahan iklim mendorong terjadinya perubahan struktural pasar tenaga kerja. Tipe pekerjaan dan cara bekerja pada masa depan juga akan jauh berbeda dibandingkan hari ini. Untuk itu, jenis dan skema beasiswa yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di masa depan yaitu fokus pada sektor Teknologi, Digitalisasi, Dan Energi Terbarukan. Namun, per tahun 2018 beasiswa LPDP masih didominasi dari sosial ekonomi dan hukum sebesar 37,90 persen. Sedangkan sektor Teknologi, Digitalisasi, Dan Energi Terbarukan baru mencapai 24,26 persen (Gambar 6).

¹ Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi yang berasal dari kelompok pengeluaran rumah tangga kuartil terendah hanya 11 persen (Kemendikbudristek, 2020).

Gambar 6. Perbandingan Penerima Beasiswa Berdasarkan Bidang Ilmu Tahun 2018



Sumber: Laporan Tahunan LPDP (2019).

Ketiga, *monitoring* dan evaluasi beasiswa yang belum optimal. Hingga saat ini LPDP belum memiliki kebijakan yang komprehensif dan terukur tentang cara penerima bantuan LPDP dapat membantu kemajuan ekonomi dan daya saing bangsa di masa mendatang. Pedoman umum LPDP hanya mengatur bahwa penerima beasiswa harus kembali ke Indonesia untuk berkontribusi, sekurang-kurangnya dua kali masa studi ditambah satu tahun. Namun, belum ada peraturan atau kebijakan yang dibuat tentang jenis, mekanisme, atau ukuran kontribusi yang diharapkan. Padahal kebijakan yang komprehensif terkait pengukuran kontribusi tersebut sangat diperlukan mengingat beasiswa dan bantuan riset yang disalurkan oleh LPDP tersebut didanai oleh pajak masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dana yang dikeluarkan seharusnya memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Pusat Kajian Anggaran, 2019).

III. REKOMENDASI

Komisi X DPR RI dapat menginstruksikan perbaikan pengelolaan LPDDP dengan beberapa catatan yaitu **pertama**, pemberian beasiswa diprioritaskan untuk sektor Teknologi, Digitalisasi, dan Energi Terbarukan yang saat ini sedang banyak dibutuhkan akibat disrupsi teknologi dan perubahan sosio-ekonomi dalam masyarakat. **Kedua**, mengingat biaya yang dikeluarkan LPDP untuk program beasiswa cukup besar, dibutuhkan regulasi terkait jenis, mekanisme maupun kontribusi apa yang diharapkan dari penerima beasiswa untuk diberikan kembali untuk kemajuan negara. **Ketiga**, LPDP sebagai pengelola dana abadi pendidikan juga diharapkan mampu meningkatkan APK PT melalui pemberian beasiswa khusus untuk masyarakat miskin. LPDP dapat membedakan persyaratan antara masyarakat miskin dengan calon penerima bantuan reguler khususnya pada pemberian beasiswa pendidikan tinggi (S1) dan pemberian kuota kepada masyarakat miskin yang lebih besar daripada beasiswa reguler.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2019). Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet Menurut Provinsi (Persen), 2017-2019.
- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. (2019). Laporan Tahunan 2018: Beasiswa Inklusif Untuk Pendidikan Berkelanjutan. Jakarta Pusat
- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. (2022). Laporan Tahunan 2021: Resiliensi, Transformasi, Kontribusi menuju Satu Dekade. Jakarta Pusat
- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. (2022) Rencana Strategi Bisnis 2020-2024 Revisi Kedua.

Kementerian Keuangan. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 *Audited*

Kementerian Keuangan. (2023). Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2024.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035.

Pusat Kajian Anggaran DPR RI. (2019). Tinjauan Kritis Atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan Melalui APBN.

Republik Indonesia. (2023). Buku II: Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

United Nations Development Programme (2022). *Human Development Report "Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World"*

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., Mum.

Penanggungjawab:

Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Tim Penyusun:

Dahiri, S.Si., M.Sc
Savitri Wulandari, S.E.
Ollani Vabiola Bangun, S.IP, MM
Iranisa S.E., M.Acc

Desain dan Layout:

Ayu Setya Lestari, S.E



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

TINJAUAN KRITIS LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI RI Lantai 6

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

www.bk.dpr.go.id



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**PUSAT ANALISIS ANGGARAN
DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

WWW.PA3KN.DPR.GO.ID
TELP. 021-5715635 FAX. 021-5715635
INSTAGRAM: @PA3KN.BKDPRRI
YOUTUBE: PA3KN BK DPR RI